RAUDHAH Proud To Be Professionals *JurnalTarbiyahIslamiyah*
Volume 11 Nomor 2 Edisi Agustus 2026
P-ISSN : 2541-3686 E-ISSN : 2746 -2447

STUDI KOMPARATIF PERNYATAAN RESMI DIPLOMASI AS VS NARASI MEDIA SOSIAL TERKAIT BLOKADE SELAT HORMUZ DAN DINAMIKA POLITIK DUNIA ISLAM

Kartika Ekawati[1], Vera Susanti[2]
[1] Faculty of Communication, Paramadina University
Email : kartika.ekawati@students.paramadina.ac.id
[2] Faculty of Economic and Business Syariah , Nur Raudhatul Ulum Islamic Studies,
Email: vemujahidah08@gmail.com

Abstract *The blockade of the Strait of Hormuz is a significant geopolitical issue that affects global trade and regional stability. Official diplomatic statements from the United States and the narratives circulating on social media often present different perspectives regarding this crisis. This study aims to analyze official U.S. diplomatic statements, identify narratives on social media, and compare the framing strategies employed. The research adopts a qualitative approach using content analysis, collecting data from U.S. government press releases, diplomatic documents, as well as trending content on Twitter, Facebook, and Instagram. The findings indicate that official statements emphasize legal legitimacy, regional stability, and navigational security, presented in a formal, fact-based, and controlled manner. In contrast, social media narratives highlight economic, political, and social impacts, characterized by subjective, emotional, and persuasive tones, reflecting public opinion and viral content. This comparison reveals a communication gap between official diplomacy and the digital public, confirming that social media influences global perceptions and opinions. The findings underscore the importance of integrating social media monitoring into diplomatic strategies in order to enhance credibility, manage public perception, and improve the effectiveness of international communication. This study contributes to understanding digital framing in international relations and offers practical recommendations for adaptive and responsive diplomatic communication in the social media era.*

Keywords: *Strait of Hormuz, U.S. diplomacy, social media narratives, digital framing, international communication*

PENDAHULUAN

Blokade Selat Hormuz merupakan salah satu isu geopolitik strategis yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perdagangan energi global, stabilitas keamanan regional, serta dinamika hubungan internasional. Selat Hormuz menjadi jalur utama distribusi minyak dari kawasan Timur Tengah menuju pasar global sehingga setiap bentuk ketegangan di wilayah tersebut berpotensi menghasilkan dampak ekonomi dan politik yang luas (Brown et al., 2026; Congressional Research Service, 2026a). Selain sebagai persoalan keamanan maritim, konflik yang melibatkan Selat Hormuz juga memiliki dimensi politik dan identitas yang kompleks. Iran sebagai negara dengan sistem Republik Islam memiliki posisi strategis dalam dinamika politik dunia Islam, khususnya dalam relasi kekuatan antara Timur Tengah dan negara-negara Barat. Oleh karena itu, keterlibatan Iran dalam isu Selat Hormuz tidak hanya

dipersepsikan sebagai konflik kepentingan ekonomi dan keamanan, tetapi juga sering dikonstruksi sebagai simbol pertarungan pengaruh politik, identitas, dan legitimasi antara Barat dan dunia Islam (Goldwyn & Clabough, 2026).

Perkembangan teknologi digital dan media sosial semakin memperluas dimensi konflik tersebut. Isu Selat Hormuz tidak lagi hanya dikonstruksi melalui komunikasi diplomatik antarnegara, tetapi juga melalui ruang digital tempat masyarakat global membangun, menyebarkan, dan memperdebatkan berbagai interpretasi terhadap konflik. Sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, secara aktif menggunakan pernyataan diplomatik resmi untuk menegaskan posisi kebijakan luar negeri, membangun legitimasi tindakan, serta mempertahankan kredibilitas internasional (Presidential Actions, 2026). Di sisi lain, masyarakat digital melalui platform media sosial menghasilkan narasi alternatif yang dapat memperkuat, mempertanyakan, atau bahkan menentang framing resmi pemerintah. Kondisi ini menunjukkan adanya perubahan dalam komunikasi internasional modern, yaitu dari komunikasi yang didominasi aktor negara (state-centered communication) menuju ekosistem diplomasi digital yang lebih terbuka dan dipengaruhi oleh opini publik global (Kormych et al., 2026).

Dalam perspektif teori framing, perbedaan antara komunikasi diplomatik resmi dan narasi media sosial menunjukkan bagaimana aktor yang berbeda dapat memberikan makna yang berbeda terhadap peristiwa yang sama. Diplomasi resmi Amerika Serikat cenderung membingkai isu Selat Hormuz melalui aspek legitimasi hukum internasional, kebebasan navigasi, keamanan regional, dan stabilitas perdagangan global. Framing tersebut bertujuan membangun persepsi bahwa keterlibatan AS merupakan bagian dari upaya menjaga keteraturan sistem internasional (Awais, 2025). Sebaliknya, narasi media sosial lebih sering membingkai konflik melalui aspek ancaman perang, dampak ekonomi masyarakat, kritik politik, sentimen emosional, serta identitas geopolitik antara Barat dan dunia Islam. Perbedaan konstruksi makna ini menunjukkan bahwa konflik geopolitik kontemporer tidak hanya berlangsung dalam ruang diplomatik, tetapi juga dalam arena kompetisi narasi digital (Azizah et al., 2025).

Selain framing, teori agenda setting juga relevan untuk memahami bagaimana isu Selat Hormuz memperoleh perhatian publik global. Pernyataan resmi pemerintah berusaha menetapkan agenda mengenai pentingnya keamanan maritim dan stabilitas internasional, sedangkan media sosial memiliki mekanisme agenda yang berbeda melalui viralitas, algoritma, dan interaksi pengguna. Platform digital memungkinkan isu tertentu mendapatkan perhatian besar berdasarkan intensitas percakapan publik, bukan hanya berdasarkan prioritas diplomatik negara. Dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi saluran penyebaran informasi, tetapi juga berperan sebagai ruang pembentukan opini yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap aktor dan konflik internasional (Ramadhani et al., 2024; Saifullizam et al., 2025).

Kajian terdahulu mengenai diplomasi digital umumnya masih berfokus pada bagaimana negara menggunakan media digital sebagai instrumen komunikasi strategis dan pembentukan citra internasional. Sementara itu, penelitian mengenai framing konflik geopolitik lebih banyak membahas bagaimana media massa membangun representasi terhadap suatu konflik (Azizah et al., 2025). Namun, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara komparatif menganalisis hubungan antara framing diplomasi resmi negara dan

narasi publik digital yang berkembang secara organik di media sosial, khususnya pada isu Selat Hormuz yang memiliki keterkaitan dengan dinamika politik dunia Islam. Kesenjangan ini menjadi penting karena dalam era digital, legitimasi suatu kebijakan luar negeri tidak hanya dibentuk oleh pernyataan resmi pemerintah, tetapi juga oleh respons, interpretasi, dan persepsi masyarakat global di ruang daring (Kormych et al., 2026; Saifullizam et al., 2025).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini memosisikan diri dalam kajian digital diplomacy dan geopolitical communication dengan menggunakan pendekatan framing analysis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pernyataan resmi diplomasi Amerika Serikat terkait blokade Selat Hormuz, mengidentifikasi narasi yang berkembang di media sosial, serta membandingkan strategi framing yang digunakan oleh kedua aktor komunikasi tersebut. Melalui pendekatan komparatif, penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana diplomasi negara dan opini publik digital saling berinteraksi dalam membentuk konstruksi makna terhadap isu geopolitik internasional.

Penelitian ini memiliki kontribusi akademik dan praktis dalam memahami transformasi komunikasi internasional pada era digital. Secara akademik, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai bagaimana teori framing dan agenda setting dapat digunakan untuk menjelaskan kompetisi narasi antara aktor negara dan masyarakat digital. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan bagi praktisi diplomasi dan pengelola komunikasi publik mengenai pentingnya pemantauan media sosial sebagai bagian dari strategi diplomasi modern. Dengan memahami dinamika opini publik digital, aktor diplomatik dapat merancang komunikasi yang lebih adaptif, kredibel, dan responsif dalam menghadapi kompleksitas isu global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi (content analysis) untuk memahami perbedaan dan persamaan antara pernyataan resmi diplomasi Amerika Serikat dan narasi media sosial terkait blokade Selat Hormuz. Metode analisis isi dipilih karena memungkinkan penelitian melakukan interpretasi sistematis terhadap teks komunikasi, mengidentifikasi pola framing, memahami konstruksi makna, serta membandingkan strategi narasi yang digunakan oleh aktor negara dan masyarakat digital. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan isi pesan, tetapi juga menganalisis bagaimana suatu isu geopolitik dikonstruksi melalui pilihan bahasa, penekanan isu, serta representasi aktor dalam ruang diplomasi formal dan media sosial.

Data penelitian terdiri atas dua kategori utama, yaitu dokumen diplomasi resmi Amerika Serikat dan konten media sosial terkait isu Selat Hormuz. Pengumpulan data dilakukan selama periode eskalasi isu Selat Hormuz pada Maret–April 2026. Pemilihan periode tersebut didasarkan pada meningkatnya intensitas pemberitaan, pernyataan diplomatik, serta diskusi publik digital mengenai ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Teknik pengumpulan data menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan data berdasarkan kesesuaian dengan tujuan penelitian dan relevansi terhadap isu blokade Selat Hormuz. Sumber data pertama berupa pernyataan resmi pemerintah Amerika Serikat yang mencakup dokumen diplomatik, press release, dan pernyataan kebijakan yang diterbitkan oleh lembaga resmi seperti U.S. Department of State, White House Briefing, dan

Congressional Research Service. Dokumen resmi dipilih berdasarkan tiga kriteria utama, yaitu: (1) diterbitkan selama periode eskalasi konflik Maret–April 2026, (2) membahas isu Selat Hormuz, Iran, keamanan maritim, atau stabilitas regional, dan (3) merepresentasikan posisi diplomatik resmi pemerintah Amerika Serikat. Analisis terhadap dokumen ini difokuskan pada konstruksi bahasa diplomatik, legitimasi hukum internasional, representasi ancaman, serta framing mengenai keamanan dan stabilitas global.

Sumber data kedua adalah konten media sosial yang berasal dari platform X (Twitter), Instagram, dan Facebook. Data dikumpulkan menggunakan purposive sampling berdasarkan kata kunci seperti "Hormuz blockade", "Selat Hormuz", "Iran vs US", "Hormuz Crisis", dan hashtag yang menjadi tren selama periode penelitian. Pemilihan unggahan media sosial dilakukan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu: (1) memiliki tingkat interaksi tinggi melalui jumlah likes, komentar, repost, atau share; (2) berasal dari akun publik, media, tokoh berpengaruh, atau unggahan yang memperoleh perhatian luas; (3) memuat narasi mengenai konflik Selat Hormuz, hubungan Amerika Serikat-Iran, dampak ekonomi, maupun respons politik masyarakat; serta (4) memiliki keterkaitan langsung dengan pembentukan opini publik digital. Data media sosial tidak hanya dianalisis berdasarkan isi informasi, tetapi juga berdasarkan bentuk komunikasi digital seperti penggunaan bahasa emosional, pola hashtag, visualisasi konflik, dan respons pengguna. Identifikasi ini dilakukan untuk memahami bagaimana karakteristik media sosial membentuk framing yang berbeda dibandingkan komunikasi diplomatik resmi. Berikut adalah contoh representasi data media sosial yang dianalisis:

Tabel 1. Contoh Data Narasi Media Sosial Terkait Selat Hormuz

Platform	Contoh Postingan	Pola Hashtag	Karakter Narasi
X (Twitter)	"If Hormuz is closed, global oil prices will explode. This is not just regional conflict, this is global crisis."	#HormuzCrisis #OilShock #WW3	Alarmis, global impact, cepat viral
Instagram	"Trump threatens Iran again… Are we heading to war?" (caption + video berita)	#Trump #IranConflict #MiddleEastTension	Provokatif, emosional, visual
Facebook	"Penutupan Selat Hormuz bisa bikin harga BBM naik drastis. Siapa yang paling dirugikan?"	#SelatHormuz #KrisisEnergi	Diskusi publik, opini panjang
X (Twitter)	"BREAKING: Iran closes Strait of Hormuz (unconfirmed)"	#BreakingNews #Hormuz	Spekulatif, rawan disinformasi

Selain itu, ditemukan pola hashtag dominan yang berulang, seperti #HormuzCrisis, #IranVsUS, #OilPriceSpike, #WW3, dan #MiddleEastConflict. Hashtag tersebut menunjukkan adanya kecenderungan framing digital yang mengarahkan isu Selat Hormuz pada konstruksi krisis global, ancaman perang, ketidakstabilan ekonomi, dan ketegangan politik internasional. Pola tersebut berbeda dengan narasi diplomasi resmi yang lebih menekankan aspek hukum internasional, stabilitas keamanan, dan kepentingan strategis. Analisis data

dilakukan melalui teknik coding tematik dengan beberapa tahapan. Tahap pertama adalah open coding, yaitu proses identifikasi awal terhadap kata, frasa, dan tema utama yang muncul dalam dokumen resmi maupun unggahan media sosial. Tahap kedua adalah axial coding, yaitu pengelompokan kode awal ke dalam kategori analitis berdasarkan hubungan antar-tema. Tahap ketiga adalah thematic interpretation, yaitu proses interpretasi terhadap pola framing dan strategi komunikasi yang muncul dari masing-masing sumber data. Kategori coding dalam penelitian ini terdiri atas lima tema utama, yaitu: (1) legitimasi hukum, (2) keamanan dan stabilitas, (3) konflik dan ancaman, (4) dampak ekonomi global, serta (5) emosi dan opini publik. Setiap dokumen resmi dan unggahan media sosial dianalisis berdasarkan tema dominan, gaya bahasa, aktor yang ditonjolkan, serta strategi framing yang digunakan.

Tabel 2. Kategori Kode

Kode	Tema Analisis	Indikator Framing
LEG	Legitimasi hukum	Hukum internasional, UNCLOS, aturan global, legitimasi tindakan
SEC	Keamanan dan stabilitas	Keamanan maritim, stabilitas regional, perlindungan jalur energi
CON	Konflik dan ancaman	Perang, eskalasi militer, ancaman politik
ECO	Dampak ekonomi global	Harga minyak, krisis energi, perdagangan internasional
EMO	Emosi dan opini publik	Ketakutan, kritik, dukungan, reaksi masyarakat digital

Untuk meningkatkan validitas penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil analisis dari dokumen diplomatik resmi, pemberitaan media, dan unggahan media sosial. Validitas data media sosial juga diperkuat melalui proses verifikasi sumber, yaitu dengan memperhatikan kredibilitas akun, tingkat keterlibatan publik, serta membandingkan klaim yang muncul dengan informasi dari sumber resmi atau media kredibel. Unggahan yang bersifat anonim, tidak relevan, atau tidak memiliki hubungan langsung dengan isu Selat Hormuz tidak dimasukkan dalam analisis. Melalui prosedur tersebut, penelitian ini tidak hanya menghasilkan perbandingan deskriptif antara diplomasi resmi dan narasi media sosial, tetapi juga memberikan analisis mengenai bagaimana kedua ruang komunikasi tersebut membangun framing yang berbeda terhadap isu geopolitik global. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menjelaskan hubungan antara komunikasi diplomatik formal yang bersifat institusional dan narasi publik digital yang dinamis dalam membentuk persepsi internasional terhadap konflik Selat Hormuz.

HASIL DAN ANALISIS

Framing Diplomasi Resmi AS

Hasil analisis isi terhadap pernyataan resmi diplomasi Amerika Serikat menunjukkan bahwa strategi komunikasi pemerintah AS terkait konflik dan blokade Selat Hormuz dibangun melalui framing utama berupa legitimasi hukum internasional, stabilitas regional,

serta perlindungan keamanan navigasi global. Dalam perspektif teori framing, diplomasi AS melakukan proses *problem definition* dengan mendefinisikan persoalan Selat Hormuz bukan sebagai konflik bilateral antara Amerika Serikat dan Iran, melainkan sebagai ancaman terhadap keteraturan sistem internasional dan kebebasan jalur perdagangan global. Pemerintah AS secara konsisten menegaskan bahwa kebebasan navigasi di Selat Hormuz merupakan prinsip hukum laut yang diakui secara internasional, sehingga setiap bentuk gangguan terhadap jalur tersebut diposisikan sebagai pelanggaran terhadap norma global yang menopang sistem perdagangan dunia (Presidential Actions, 2026). Narasi ini diperkuat melalui rujukan terhadap prinsip hukum maritim internasional, termasuk pedoman keamanan yang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap norma UNCLOS dalam menjaga legitimasi lintas negara (Awais, 2025).

Pada aspek *causal interpretation*, diplomasi AS membangun konstruksi bahwa ketidakstabilan kawasan berasal dari ancaman terhadap keamanan maritim dan potensi gangguan terhadap distribusi energi global. Dengan demikian, isu Selat Hormuz tidak hanya dikomunikasikan sebagai persoalan regional Timur Tengah, tetapi sebagai masalah keamanan internasional yang membutuhkan respons kolektif. Seperti dijelaskan oleh Kormych et al. (2026), AS menekankan pentingnya kerja sama dengan sekutu strategis, termasuk NATO dan negara-negara Teluk, untuk menjaga jalur pelayaran dari potensi eskalasi konflik. Dalam kerangka komunikasi diplomatik tersebut, tindakan keamanan tertentu diposisikan sebagai langkah defensif yang bertujuan mempertahankan kebebasan navigasi dan hukum internasional, bukan sebagai bentuk agresi politik atau militer (Brown et al., 2026; Al Jazeera Staff, 2026).

Strategi framing tersebut menunjukkan bagaimana diplomasi resmi berfungsi sebagai instrumen pengelolaan persepsi internasional. Pernyataan pemerintah AS melalui saluran resmi seperti state.gov menggunakan gaya komunikasi formal, teknis, dan berbasis data, dengan menghindari ekspresi emosional atau opini subjektif (Congressional Research Service, 2026a). Jika dianalisis melalui perspektif agenda setting, pola komunikasi ini menunjukkan upaya pemerintah AS dalam menetapkan prioritas isu (*issue salience*) bahwa persoalan utama dalam konflik Selat Hormuz adalah keamanan navigasi, stabilitas energi, dan kepatuhan terhadap hukum internasional. Dengan mengontrol agenda komunikasi tersebut, AS berusaha mempertahankan kredibilitas diplomatik sekaligus membangun dukungan dari komunitas internasional (Goldwyn & Clabough, 2026).

Selain membangun legitimasi hukum, framing diplomasi AS juga mengandung unsur *moral evaluation*, yaitu konstruksi bahwa Amerika Serikat memiliki peran sebagai penjaga stabilitas sistem internasional. Narasi resmi menghubungkan kebijakan luar negeri AS dengan perlindungan keamanan kolektif dan stabilitas ekonomi global, sehingga keterlibatan AS tidak hanya ditampilkan sebagai perlindungan kepentingan nasional, tetapi juga sebagai kontribusi terhadap keamanan global (Bennett, 2026). Pernyataan resmi dan dokumen pemerintah secara konsisten membangun pesan bahwa keterlibatan AS bertujuan menjaga prinsip kebebasan navigasi serta memperkuat kerja sama multilateral dalam melindungi jalur perdagangan strategis seperti Selat Hormuz (Awais, 2025; Presidential Actions, 2026).

Pada tahap *treatment recommendation*, diplomasi AS menawarkan solusi melalui kombinasi pendekatan diplomatik, keamanan, dan kerja sama internasional. Hal ini terlihat dalam langkah-langkah konkret seperti penyediaan asuransi risiko politik dan pengawalan

kapal komersial melalui Selat Hormuz untuk memastikan keberlanjutan perdagangan energi global sebagaimana diumumkan oleh Presiden Trump (Al Jazeera Staff, 2026). Strategi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi diplomatik AS tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai mekanisme pembentukan legitimasi terhadap tindakan politik dan keamanan yang dilakukan (Goldwyn & Clabough, 2026; Congressional Research Service, 2026b).

Berdasarkan sintesis analitis tersebut, framing diplomasi resmi AS dapat dipahami sebagai bentuk *state-centered framing*, yaitu konstruksi narasi yang dikendalikan oleh aktor negara untuk mempertahankan legitimasi kebijakan luar negeri. Diplomasi AS membangun agenda komunikasi melalui bahasa institusional yang menekankan stabilitas, hukum internasional, dan keamanan global. Namun, pola komunikasi yang sangat formal tersebut juga menciptakan jarak dengan dinamika opini publik digital yang lebih emosional dan partisipatif. Kondisi inilah yang menjadi dasar munculnya kompetisi framing antara diplomasi resmi negara dan narasi masyarakat digital dalam memahami konflik Selat Hormuz.

Narasi Media Sosial

Berbeda dengan diplomasi resmi negara yang memiliki struktur komunikasi formal dan institusional, media sosial membentuk ruang komunikasi yang lebih terbuka, cepat, dan partisipatif dalam membangun narasi mengenai konflik Selat Hormuz. Hasil analisis menunjukkan bahwa platform seperti Truth Social, Instagram, X (sebelumnya Twitter), dan YouTube tidak hanya berfungsi sebagai media penyebaran informasi, tetapi juga menjadi arena pembentukan opini publik global. Dalam perspektif framing theory, media sosial menghasilkan proses konstruksi makna yang berbeda dari diplomasi resmi karena pengguna digital memiliki kebebasan dalam menentukan aspek konflik yang dianggap penting, baik melalui teks, gambar, video, maupun pola interaksi seperti komentar dan penyebaran ulang konten.

Pada tahap *problem definition*, narasi media sosial lebih sering mendefinisikan isu Selat Hormuz sebagai ancaman perang, krisis ekonomi global, dan konflik politik antara Amerika Serikat dan Iran. Hal ini berbeda dengan diplomasi resmi AS yang menempatkan isu tersebut sebagai persoalan keamanan maritim dan hukum internasional. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, melalui akun Truth Social, menyampaikan pernyataan bernada keras terhadap Iran menjelang tenggat waktu pembukaan Selat Hormuz sebagai jalur vital perdagangan minyak dunia. Dalam salah satu unggahannya, Trump menyatakan bahwa "Seluruh peradaban akan mati malam ini, dan tidak akan pernah bisa dihidupkan kembali" (Akuratco, 2026). Pernyataan tersebut memperoleh perhatian luas karena karakter komunikasi media sosial yang cenderung memperkuat pesan emosional, dramatis, dan kontroversial sehingga mendorong peningkatan keterlibatan publik.

Melalui perspektif agenda setting digital, viralitas pernyataan tersebut menunjukkan bahwa media sosial memiliki mekanisme pembentukan agenda yang berbeda dibandingkan

komunikasi diplomatik resmi. Jika pemerintah berusaha menetapkan agenda melalui dokumen kebijakan dan pernyataan formal, maka media sosial menentukan perhatian publik melalui tingkat interaksi, algoritma, serta intensitas penyebaran informasi. Akibatnya, aspek yang memperoleh perhatian terbesar bukan selalu dimensi hukum atau diplomasi, tetapi isu yang memiliki daya tarik emosional tinggi seperti ancaman perang, ketakutan publik, dan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Pada tahap *causal interpretation*, media sosial cenderung menghubungkan konflik Selat Hormuz dengan tindakan dan keputusan aktor politik tertentu. Pernyataan Trump mengenai ultimatum selama 48 jam kepada Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz, termasuk ancaman terhadap infrastruktur strategis apabila ultimatum tersebut tidak dipatuhi, menjadi salah satu contoh bagaimana individu politik ditempatkan sebagai pusat narasi konflik (Akuratco, 2026). Pola komunikasi ini memperlihatkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi alat penyampaian pesan politik, tetapi juga menjadi instrumen diplomasi personal yang memungkinkan pemimpin negara berkomunikasi langsung dengan publik internasional tanpa melalui mekanisme diplomatik tradisional.

Selain melalui narasi ancaman, media sosial juga memperluas perdebatan mengenai posisi strategis Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Pernyataan Trump yang dikutip oleh Metro TV (2026) dan Kompas TV Kediri (2026) mengenai klaim bahwa Amerika Serikat tidak lagi bergantung pada Selat Hormuz karena peningkatan produksi minyak domestik menimbulkan diskusi publik mengenai perubahan strategi energi dan kebijakan luar negeri AS. Narasi tersebut memperlihatkan bahwa media sosial dapat memperluas isu geopolitik menjadi perdebatan multidimensi yang melibatkan aspek ekonomi, keamanan energi, dan kepemimpinan politik. Hal ini semakin kompleks karena sekitar 20% perdagangan minyak dunia masih melewati jalur tersebut sehingga stabilitas Selat Hormuz tetap menjadi perhatian global (Doha News, 2026).

Dalam konteks negosiasi dan diplomasi internasional, media sosial juga digunakan sebagai instrumen pembentukan persepsi politik. Pernyataan Trump mengenai posisi Amerika Serikat dalam negosiasi dengan Iran dan tuduhan terhadap pihak tertentu yang dianggap mengganggu proses diplomatik memperlihatkan bagaimana komunikasi politik dapat berlangsung secara langsung melalui platform digital (AIBSNews24, 2026). Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan karakter diplomasi modern, di mana batas antara komunikasi resmi negara, komunikasi personal pemimpin politik, dan opini publik digital menjadi semakin sulit dipisahkan.

Respons terhadap tindakan Iran juga menunjukkan bagaimana media sosial dapat mempercepat penyebaran berbagai interpretasi terhadap suatu peristiwa. Informasi mengenai klaim bahwa Iran menutup Selat Hormuz sebagai respons terhadap serangan Amerika Serikat dan Israel memperoleh perhatian luas karena berkaitan langsung dengan keamanan energi global (Doha News, 2026). Namun, munculnya informasi berbeda dari CENTCOM yang menyatakan bahwa Selat Hormuz tetap terbuka memperlihatkan adanya kompetisi informasi antara berbagai sumber. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya mempercepat distribusi informasi, tetapi juga mempercepat penyebaran ketidakpastian ketika proses verifikasi belum berjalan secara optimal.

Dari sisi *moral evaluation*, media sosial memberikan ruang bagi publik untuk membangun penilaian moral terhadap aktor yang terlibat dalam konflik. Sebagian pengguna

menilai tindakan Amerika Serikat sebagai bentuk perlindungan terhadap keamanan global, sedangkan sebagian lainnya mengkritiknya sebagai bentuk dominasi geopolitik Barat terhadap Timur Tengah. Perbedaan interpretasi tersebut menunjukkan bahwa media sosial berfungsi sebagai ruang *counter-framing*, yaitu tempat munculnya narasi alternatif yang dapat mendukung ataupun menentang framing resmi pemerintah.

Namun, karakter terbuka media sosial juga menciptakan risiko penyebaran disinformasi. Salah satu contohnya adalah unggahan mengenai pembentukan "Hormuz Peace Board" oleh Trump dan klaim bahwa konflik Iran merupakan akibat kebijakan pemerintahan sebelumnya, yang kemudian dikonfirmasi sebagai informasi palsu oleh Gedung Putih (AFP via Yahoo News, 2026). Fenomena ini menunjukkan bahwa kecepatan distribusi informasi digital tidak selalu sejalan dengan akurasi informasi. Oleh karena itu, validasi informasi menjadi aspek penting dalam memahami bagaimana media sosial memengaruhi opini publik terhadap konflik internasional.

Selain dimensi keamanan dan ekonomi, hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian narasi media sosial juga membangun framing berbasis identitas politik dan keagamaan. Konflik Selat Hormuz tidak hanya dibaca sebagai persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran, tetapi juga dikaitkan dengan posisi Iran sebagai negara Islam di Timur Tengah. Sejumlah narasi digital menggambarkan Iran sebagai simbol perlawanan terhadap dominasi Barat, sementara narasi lainnya melihat konflik tersebut sebagai ancaman terhadap stabilitas dunia Islam. Hal ini memperlihatkan bahwa media sosial mampu memperluas isu geopolitik menjadi arena pembentukan solidaritas, identitas ideologis, dan persepsi kolektif.

Berdasarkan sintesis tersebut, narasi media sosial dapat dipahami sebagai bentuk *networked public framing*, yaitu proses pembentukan makna yang tidak dikendalikan oleh satu aktor tunggal, tetapi terbentuk melalui interaksi pengguna, algoritma, opini publik, dan dinamika viralitas. Berbeda dengan diplomasi resmi AS yang berusaha mempertahankan kontrol pesan melalui legitimasi institusional, media sosial menciptakan ruang interpretasi yang lebih cair, emosional, dan kompetitif. Perbedaan inilah yang menunjukkan adanya transformasi diplomasi modern dari komunikasi satu arah berbasis negara menuju kompetisi narasi antara aktor negara dan masyarakat digital global.

Perbandingan dan Komparasi

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara framing diplomasi resmi dan narasi media sosial dalam membangun pemahaman publik terhadap isu Selat Hormuz. Perbedaan tersebut tidak hanya terletak pada isi pesan, tetapi juga pada cara masing-masing aktor komunikasi mendefinisikan masalah, menentukan prioritas isu, serta membangun interpretasi terhadap konflik internasional. Dalam konteks ini, diplomasi resmi dan media sosial dapat dipahami sebagai dua arena komunikasi yang saling berkompetisi dalam membentuk persepsi global terhadap konflik Amerika Serikat dan Iran.

Media massa dan media sosial menonjolkan fokus yang berbeda dalam pemberitaan isu internasional (Azizah et al., 2025). Media massa seperti Kompas TV, Metro TV, dan CNN Indonesia cenderung menempatkan konflik Selat Hormuz dalam konteks geopolitik, keamanan energi, dan stabilitas internasional (Kompas TV Kediri, 2026; Metro TV, 2026). Pola pemberitaan tersebut memiliki karakter yang relatif sejalan dengan diplomasi resmi karena

lebih menekankan fakta, data, pernyataan institusional, dan analisis pakar. Dalam konteks agenda setting, media massa berperan menentukan isu yang dianggap penting oleh publik dengan menonjolkan aspek strategis seperti risiko ekonomi global, hubungan internasional, dan konsekuensi keamanan.

Sebaliknya, media sosial membangun agenda publik melalui mekanisme yang berbeda. Jika diplomasi resmi menempatkan stabilitas kawasan dan hukum internasional sebagai isu utama, media sosial lebih banyak menampilkan aspek yang memiliki kedekatan emosional dengan pengguna, seperti ancaman perang, kenaikan harga energi, kontroversi pemimpin politik, dan konflik identitas. Unggahan Trump di Truth Social maupun konten Instagram seperti Akuratco dan AIBSNews24 menunjukkan bahwa pesan yang memiliki unsur kontroversi dan dramatisasi lebih mudah memperoleh perhatian publik digital (Akuratco, 2026; AIBSNews24, 2026). Hal ini memperlihatkan bahwa dalam ruang digital, tingkat perhatian publik tidak hanya ditentukan oleh kepentingan geopolitik suatu isu, tetapi juga oleh daya tarik emosional dan potensi viralitasnya (Saifullizam et al., 2025).

Berdasarkan perspektif teori agenda setting (McCombs & Shaw), fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran dari agenda yang dikendalikan institusi menuju agenda yang dibentuk secara partisipatif oleh masyarakat digital. Diplomasi resmi berusaha menetapkan bahwa isu utama Selat Hormuz adalah keamanan navigasi dan stabilitas global, sementara media sosial memperluas agenda tersebut menjadi isu perang, ekonomi masyarakat, kritik politik, dan identitas ideologis. Perbedaan agenda tersebut menunjukkan bahwa aktor negara tidak lagi menjadi satu-satunya pihak yang menentukan bagaimana konflik internasional dipahami oleh publik.

Dalam konteks dunia Islam, framing terhadap Iran menjadi salah satu aspek yang memperlihatkan perbedaan konstruksi makna antara komunikasi formal dan komunikasi digital. Diplomasi resmi lebih banyak menempatkan Iran dalam kerangka keamanan internasional dan hubungan antarnegara, sedangkan sebagian narasi media sosial membingkai Iran sebagai simbol politik Islam yang berhadapan dengan pengaruh Barat. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa konflik geopolitik dapat mengalami perluasan makna ketika masuk ke ruang digital, karena publik tidak hanya menafsirkan konflik berdasarkan kepentingan negara, tetapi juga melalui perspektif identitas, solidaritas, dan nilai ideologis.

Dalam perspektif teori framing (Entman), diplomasi resmi dan media sosial memiliki perbedaan pada empat elemen utama framing. Pada aspek *problem definition*, diplomasi AS mendefinisikan konflik sebagai persoalan keamanan maritim, sedangkan media sosial mendefinisikannya sebagai ancaman perang dan krisis global. Pada aspek *causal interpretation*, diplomasi resmi menekankan ancaman terhadap hukum internasional, sementara media sosial lebih sering mengaitkan konflik dengan tindakan aktor politik tertentu seperti Trump atau Iran. Pada aspek *moral evaluation*, pemerintah membangun legitimasi tindakan melalui prinsip stabilitas internasional, sedangkan publik digital menghasilkan berbagai penilaian moral yang lebih beragam. Pada aspek *treatment recommendation*, diplomasi resmi menawarkan penyelesaian melalui kerja sama internasional, sementara media sosial lebih banyak menampilkan tuntutan, kritik, atau dukungan publik terhadap aktor tertentu.

Perbedaan fokus ini berdampak langsung terhadap pembentukan persepsi publik. Media massa dan diplomasi resmi cenderung menghasilkan pemahaman yang berbasis informasi terstruktur, sedangkan media sosial lebih cepat membangun opini emosional dan

terkadang memperkuat polarisasi (Faturahman et al., 2024). Dalam konteks komunikasi internasional modern, media massa berfungsi sebagai *information gatekeeper* yang menjaga kualitas informasi, sedangkan media sosial berperan sebagai *opinion amplifier* yang mempercepat penyebaran persepsi publik.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi resmi dan media sosial tidak dapat dipahami sebagai dua ruang komunikasi yang terpisah, tetapi sebagai ekosistem komunikasi yang saling memengaruhi. Diplomasi negara berusaha membangun legitimasi melalui kontrol pesan, sedangkan masyarakat digital membentuk interpretasi melalui interaksi sosial dan produksi makna kolektif. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa konflik internasional pada era digital tidak hanya berlangsung melalui kekuatan politik dan militer, tetapi juga melalui kompetisi framing dalam membentuk persepsi global.

Perbedaan sumber informasi menjadi faktor penting yang membentuk perbedaan framing antara diplomasi resmi, media massa, dan media sosial. Dalam konteks komunikasi internasional, kredibilitas tidak hanya ditentukan oleh isi informasi, tetapi juga oleh mekanisme produksi dan distribusi pesan. Diplomasi resmi dan media massa menggunakan proses komunikasi yang lebih terstruktur melalui lembaga pemerintah, pernyataan pejabat, dokumen kebijakan, serta analisis pakar. Sebaliknya, media sosial memungkinkan setiap pengguna untuk berperan sebagai produsen informasi sehingga menghasilkan ruang komunikasi yang lebih cepat, terbuka, tetapi memiliki tingkat validitas yang beragam.

Media massa menggunakan data resmi, pernyataan pejabat, dan wawancara dengan pakar untuk menjaga akurasi berita. Misalnya, Kompas TV mengutip pendapat dosen ilmu politik untuk menganalisis dampak perubahan posisi Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz (Kompas TV Kediri, 2026). Pola ini memperlihatkan bahwa media massa memiliki fungsi verifikasi dan penyaringan informasi sebelum pesan disampaikan kepada publik. Dalam konteks agenda setting, proses seleksi tersebut memungkinkan media menentukan aspek mana dari konflik Selat Hormuz yang perlu mendapatkan perhatian utama, seperti keamanan energi, stabilitas kawasan, atau konsekuensi geopolitik.

Sebaliknya, media sosial memiliki karakter komunikasi yang lebih horizontal dan partisipatif. Keunggulan utama media sosial terletak pada kemampuan menyebarkan informasi secara cepat dan memungkinkan keterlibatan publik secara langsung (Ramadhani et al., 2024). Namun, kecepatan tersebut juga menghasilkan tantangan berupa penyebaran informasi yang belum diverifikasi. Salah satu contoh adalah beredarnya unggahan mengenai pembentukan "Hormuz Peace Board" oleh Trump yang kemudian dikonfirmasi sebagai informasi palsu oleh Gedung Putih (AFP via Yahoo News, 2026). Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam ruang digital, viralitas suatu informasi tidak selalu berkorelasi dengan tingkat akurasinya.

Dalam perspektif framing, perbedaan sumber informasi tersebut berpengaruh terhadap cara realitas konflik dikonstruksi. Diplomasi resmi membangun framing melalui otoritas institusional dan legitimasi sumber, sedangkan media sosial membangun framing melalui partisipasi publik, pengalaman personal, dan persepsi kolektif. Oleh karena itu, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai saluran komunikasi, tetapi juga sebagai ruang produksi makna tempat berbagai aktor bersaing dalam membangun interpretasi terhadap konflik internasional.

Meskipun memiliki risiko penyebaran disinformasi, media sosial tetap memiliki peran penting dalam memahami dinamika opini publik global. Narasi digital menunjukkan bagaimana masyarakat merespons kebijakan luar negeri, memahami konflik, serta membangun dukungan atau kritik terhadap aktor tertentu. Dengan demikian, kombinasi antara sumber diplomatik resmi, media massa, dan media sosial diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konflik Selat Hormuz, karena masing-masing menyediakan perspektif berbeda antara fakta institusional dan persepsi publik.

Dampak narasi terhadap persepsi publik menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara komunikasi yang dibangun melalui institusi resmi dan komunikasi yang berkembang melalui masyarakat digital. Media massa dan diplomasi resmi cenderung membentuk pemahaman publik melalui penyajian informasi yang berbasis analisis risiko, data, dan perspektif ahli sehingga masyarakat memperoleh gambaran konflik dalam kerangka geopolitik dan strategis (Dwi Apriliani et al., 2022). Misalnya, pembahasan mengenai ancaman Trump terhadap Iran dan implikasinya terhadap pasokan energi global memberikan ruang bagi publik untuk memahami konflik sebagai persoalan keamanan internasional.

Sebaliknya, media sosial mempercepat pembentukan persepsi melalui mekanisme emosional, interaksi pengguna, dan penyebaran konten viral. Unggahan Trump yang bersifat provokatif, respons pengguna, serta penyebaran ulang konten terkait Selat Hormuz menunjukkan bagaimana opini publik digital dapat terbentuk secara cepat. Dalam perspektif framing, media sosial memperkuat aspek tertentu dari suatu isu melalui pengulangan narasi, simbol, dan interpretasi emosional. Hal ini menyebabkan konflik tidak hanya dipahami sebagai persoalan kebijakan luar negeri, tetapi juga sebagai isu moral, identitas, dan kepentingan kelompok tertentu.

Keberadaan hoaks atau informasi yang belum diverifikasi, seperti klaim mengenai "Hormuz Peace Board", memperlihatkan bahwa ruang digital dapat memperkuat ketidakpastian informasi. Namun, pada saat yang sama, media sosial juga memberikan gambaran mengenai sentimen masyarakat global yang sulit diperoleh melalui komunikasi diplomatik formal. Dengan demikian, media sosial memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai sumber pemahaman opini publik dan sebagai ruang yang membutuhkan pengelolaan informasi secara kritis.

Berdasarkan teori agenda setting, perbedaan dampak tersebut menunjukkan bahwa perhatian publik terhadap konflik internasional tidak hanya ditentukan oleh aktor negara atau media tradisional, tetapi juga oleh dinamika komunikasi digital. Diplomasi resmi membentuk agenda melalui legitimasi institusi, sementara masyarakat digital membentuk agenda melalui intensitas percakapan dan keterlibatan pengguna. Oleh karena itu, keberhasilan diplomasi modern tidak hanya bergantung pada kemampuan menyampaikan pesan resmi, tetapi juga pada kemampuan memahami dan merespons persepsi publik digital.

Dengan demikian, media massa dan media sosial memiliki peran berbeda namun saling melengkapi. Media massa menyediakan analisis dan fakta untuk pengambilan keputusan berbasis informasi, sementara media sosial merefleksikan opini publik secara cepat dan interaktif (Saifullizam et al., 2025). Keduanya penting untuk memahami isu kompleks seperti ketegangan Selat Hormuz melalui perspektif multidimensional.

Volume 11 Nomor 2 Edisi Agustus 2026
P-ISSN : 2541-3686 E-ISSN : 2746 -2447

Tabel 1. Perbandingan Narasi Media Massa vs Media Sosial

Aspek	Media Massa	Media Sosial
Fokus	Analisis geopolitik, dampak strategis, stabilitas energi	Kontroversi, pernyataan provokatif, reaksi emosional publik
Sumber	Pernyataan resmi, data lembaga, wawancara pakar	Unggahan pribadi, repost, screenshot (terkadang hoaks)
Gaya Bahasa	Formal, objektif, faktual	Sensasional, emosional, persuasif
Kredibilitas	Tinggi, terverifikasi	Variabel, tergantung validitas unggahan
Dampak terhadap Publik	Membentuk opini berbasis analisis dan fakta	Memicu opini subjektif, viralitas, dan polarisasi
Kecepatan Penyebaran	Lambat, sesuai jadwal editorial	Cepat, real-time
Interaktivitas	Terbatas (komentar, forum)	Tinggi, komentar, likes, share, reaksi langsung

Berdasarkan tabel 1, terlihat bahwa perbedaan antara media massa dan media sosial tidak hanya menunjukkan variasi bentuk komunikasi, tetapi juga memperlihatkan perubahan struktur kekuasaan dalam pembentukan narasi geopolitik. Media massa dan diplomasi resmi mempertahankan peran sebagai sumber informasi yang mengutamakan validasi, konteks, dan legitimasi. Sebaliknya, media sosial berperan sebagai ruang partisipatif yang memungkinkan publik ikut menentukan arah interpretasi terhadap suatu konflik.

Perbandingan tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari model komunikasi internasional yang bersifat satu arah menuju model komunikasi berbasis jaringan (*networked communication*). Dalam konteks Selat Hormuz, Amerika Serikat dapat membangun narasi resmi mengenai keamanan global, tetapi persepsi publik juga dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat digital membingkai konflik melalui pengalaman, emosi, dan identitas sosial (Saifullizam et al., 2025).

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik Selat Hormuz tidak hanya merupakan persoalan geopolitik, tetapi juga arena kompetisi framing antara diplomasi resmi dan opini publik digital. Diplomasi modern perlu memahami bahwa legitimasi internasional tidak lagi hanya bergantung pada kekuatan institusi negara, tetapi juga pada kemampuan membaca, mengelola, dan merespons dinamika narasi yang berkembang dalam ruang digital global.

KESIMPULAN

Pernyataan resmi diplomasi Amerika Serikat terkait blokade Selat Hormuz menekankan legitimasi hukum internasional, stabilitas regional, dan keamanan navigasi, dengan penyampaian yang formal, berbasis fakta, dan minim opini publik. Sebaliknya, narasi yang berkembang di media sosial menekankan dampak ekonomi, politik, dan sosial secara subjektif, emosional, dan persuasif, mencerminkan opini publik dan konten viral. Perbedaan framing ini menyoroti adanya *communication gap* antara narasi resmi pemerintah dan persepsi publik digital, yang menjadi faktor penting dalam membentuk opini global.

Perbedaan framing tersebut memiliki implikasi signifikan bagi strategi komunikasi publik dan diplomasi modern. Diplomasi resmi berfokus pada kontrol narasi dan kredibilitas internasional, sementara media sosial bersifat desentralisasi, cepat tersebar, dan sangat dipengaruhi opini publik. Pemahaman terhadap prioritas isu, gaya komunikasi, dan cara penyebaran narasi menjadi kunci bagi diplomat dan pembuat kebijakan untuk menyelaraskan pesan resmi dengan persepsi publik, sekaligus memitigasi misinformasi dan persepsi negatif global.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa identitas Iran sebagai negara Islam turut memengaruhi pembentukan narasi publik di media sosial. Konflik Selat Hormuz tidak hanya dipersepsikan sebagai isu keamanan global, tetapi juga dikaitkan dengan dinamika politik dunia Islam dan relasi antara Barat dan Timur Tengah. Hal ini memperlihatkan bahwa faktor identitas keagamaan dapat menjadi elemen penting dalam framing media digital terhadap isu geopolitik internasional.

Penelitian ini merekomendasikan integrasi pemantauan media sosial ke dalam strategi diplomasi sebagai alat penting untuk meningkatkan efektivitas komunikasi internasional. Dengan memantau opini publik digital dan tren narasi di platform daring, diplomat dapat menyesuaikan pesan resmi agar lebih relevan, kredibel, dan persuasif, sekaligus menjaga legitimasi kebijakan luar negeri. Pendekatan ini penting untuk memastikan diplomasi modern tetap adaptif, responsif, dan efektif di era media sosial yang cepat dan dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

AFP via Yahoo News. (2026, March 18). *Supposed Trump post touting 'Hormuz Peace Board' is fake*. Yahoo News. https://malaysia.news.yahoo.com/supposed-trump-post-touting-hormuz-202727466.html

AIBSNews24. (2026, April 8). *US President Donald Trump posts on Truth Social about ceasefire points and fraudsters*. Instagram. https://www.instagram.com/p/DW4SSzwFMRu/

Akuratco. (2026, April 7). *Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, melontarkan ancaman baru bernada keras terhadap Iran menjelang tenggat waktu pembukaan Selat Hormuz*. Instagram. https://www.instagram.com/p/DW1VoOokVWv/

Al Jazeera Staff. (2026, March 3). *US will provide insurance for ships in Gulf amid Iranian attacks: Trump*. Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/news/2026/3/3/us-will-provide-insurance-for-ships-in-gulf-amid-iranian-attacks-trump#:~:text=US%20Navy%20'will%20begin%20escorting,if%20necessary%2C%20President%20Trump%20says.

Awais, F. (2025). UNCLOS and beyond: Strengthening maritime governance through international legal frameworks. *ASSA Journal, 4*(01), 2984–2993. https://doi.org/10.5281/zenodo.16937200

Azizah, I. A., Ridhatullah, N., Hikmah, A. N., & Sodikin. (2025). Perbandingan framing pemberitaan Timur Tengah oleh media Al Jazeera dan CNN. *International Conference on Islamic Civilisation and Humanities*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Bennett, B. (2026, April 9). *White House: Strait of Hormuz closure 'completely unacceptable' under ceasefire*. TIME. https://time.com/

Brown, P., Ratner, M., Rosen, L. W., & Thomas, C. (2026, March 11). *Iran conflict and the Strait of Hormuz: Impacts on oil, gas, and other commodities*. Congressional Research Service. https://www.congress.gov/crs-product/R45281

Congressional Research Service. (2026a). *Iran conflict and the Strait of Hormuz: Impacts on oil, gas, and other commodities* (R45281). https://www.congress.gov/crs_external_products/R/PDF/R45281/R45281.6.pdf

Congressional Research Service. (2026b). *Iran conflict and the Strait of Hormuz: Updated briefing on energy markets and military operations*. https://www.congress.gov/crs-product/R45281

Doha News. (2026, April 7). *Iran says it has closed the Strait of Hormuz following U.S. and Israeli strikes*. X. https://x.com/dohanews/status/2028822063595888710

Dwi Apriliani, N. A., Chairudin, M., Hariyanti, S., Puteri Ramadhanti, E., Afriza Aprilian, M., Nuur Fauzaan, M., & Santoso, G. (2022). Peran media massa dalam membentuk opini publik dalam konteks kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT), 1*(2), 156–164. https://doi.org/10.9000/jpt.v1i2.325

Faturahman, R., Azahra, N., Perdika, A. T., Akmal, F. M., Kamila, N. R., & Khoirotun, P. (2024). Polarisasi sebagai bentuk efek negatif dalam pembentukan opini publik pada pemilihan presiden 2019. *INTERAKSI PERADABAN: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, 4*(1). http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/interaksi

Goldwyn, D. L., & Clabough, A. (2026, March 3). *How the US and its allies can prevent an energy supply crisis in the Strait of Hormuz*. Atlantic Council. https://www.atlanticcouncil.org/dispatches/how-the-us-and-its-allies-can-prevent-an-energy-supply-crisis-in-the-strait-of-hormuz/#:~:text=First%2C%20the%20administration%20should%20immediately,happens%20next%20with%20oil%20markets.

Kompas TV Kediri. (2026). *Memanas! Donald Trump pertimbangkan tinggalkan Selat Hormuz, strategi baru AS?* Kompas TV. https://www.kompas.tv

Kormych, L., Krasnopolska, T., Kormych, A., & Ulianova, H. (2026). Navigating narratives: Digital diplomacy and freedom of navigation in the Black Sea. *Lex Portus, 12*(1). https://doi.org/10.62821/lp12102

Kormych, L., Krasnopolska, T., Kormych, A., & Ulianova, H. (2026). *Navigating narratives: Digital diplomacy and freedom of navigation in the Black Sea*. Lex Portus, 12(1). https://doi.org/10.62821/lp12102

Maritime Administration. (2025). *2025-009-Strait of Hormuz and Gulf of Oman-Iranian illegal boarding / detention / seizure* (MSCI Advisory No. 2025-009). U.S. Department of Transportation. dot.gov

Metro TV. (2026). *Trump nyatakan Amerika tak butuh Selat Hormuz | Top News* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=K1zzcSp1Z2I

Presidential Actions. (2026, February 6). *Addressing threats to the United States by the Government of Iran: Executive Orders*. The White House. https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/02/addressing-threats-to-the-united-states-by-the-government-of-iran/#:~:text=To%20deal%20with%20the%20national%20emergency%20described%20in%20Executive%20Order,emergency%20described%20in%20those%20orders.

Ramadhani, O. A., Azzahra, A. J., Siregar, A. A., & Ummah, A. (2024). Analisis keterlibatan warga digital melalui media sosial dalam gerakan #ReformasiDikorupsi di Indonesia. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 4*(2), 1–14. https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.2058

Reuters. (2026, March 11). *US destroys mine-laying vessels as Trump warns Iran over Strait of Hormuz*. Reuters. https://www.reuters.com/world/middle-east/us-energy-secretary-deletes-post-about-navy-escorting-vessel-through-strait-2026-03-10/

Saifullizam, S. S., Sharul Nizam, N. Y., Ismail, N., Zainuddin, N. S., Iswandi, N. K. Z., Ramlan, A. F., & Paskarina, C. (2025). Paparan media dan dampaknya terhadap persepsi publik. *SOSIOGLOBAL: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, 9*(2), 185.

Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s)

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

